

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Internal adalah sistem yang bertujuan untuk melindungi kekayaan perusahaan, atau bisa dijelaskan sebagai suatu sistem yang memberikan keyakinan terhadap pencapaian suatu keandalan pelaporan keuangan, efektivitas serta efisiensi suatu operasi dan terhadap kepatuhan hukum serta peraturan yang berlaku (IAI, 2001). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa pengendalian internal digunakan sebagai upaya preventif dalam mencegah tindakan penyelewengan tugas yang mana hal tersebut dapat mengancam keberlangsungan perusahaan, masalah tersebut tentunya dapat diantisipasi lebih awal jika dalam hal ini perusahaan melakukan pelaksanaan pengendalian internal secara efektif (Fajar & Rusmana, 2018).

Adapun menurut Sudarmanto et al. (2021) dalam bukunya yang berjudul Sistem Pengendalian Internal (SPI), mengungkapkan beberapa definisi lain mengenai SPI dari beberapa sudut pandang. Menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commissions (COSO)* pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM) seperti manajer, dewan direksi, ataupun karyawan, hal tersebut dirancang guna memastikan agar perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuannya dalam hal efisiensi dan efektivitas produksi, penyajian

laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam hal ketaatan terhadap pertauran perundang - undangan yang berlaku. Lebih lanjut dijelaskan menurut *International Federation of Accountants* (IFAC) menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan alat manajemen risiko yang dipahami, diawasi serta dilaksanakan dari tingkat pemimpin sampai pada karyawan guna meminimalisir adanya kerugian. Lalu menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah sistem yang dibuat oleh suatu organisasi atau perusahaan guna meningkatkan efisiensi, selain itu juga digunakan untuk menjaga aset, ketelitian data, menciptakan kedisiplinan serta ketaatan terhadap kebijakan organisasi atau perusahaan.

SPI yang efektif serta efisien mampu membantu perusahaan menjaga aset perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan dalam perusahaan atau organisasi terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, serta pelanggaran aspek kehati – hatian (Fajar & Rusmana, 2018).

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa SPI merupakan seperangkat sub sistem, aturan, prosedur, maupun teknik yang ditetapkan dalam suatu organisasi, yang mana sistem pengendalian internal ini merupakan salah satu bagian penting dalam suatu perusahaan atau organisasi. Hal itu karena selain dipercaya mampu mengefisiensikan operasi suatu organisasi, adanya SPI yang efektif serta efisien juga mampu untuk

meminimalisir adanya kerugian serta menjaga aset perusahaan tetap aman, sehingga mampu membantu dalam mencapai tujuan perusahaan ataupun organisasi termasuk dalam hal ini yaitu Rumah Sakit.

Rumah sakit sendiri dapat didefinisikan sebagai salah satu organisasi yang berbentuk sektor publik dan bergerak pada bidang pelayanan kesehatan. Berdirinya rumah sakit bertujuan untuk mengupayakan pengobatan serta pemulihan. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa rumah sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan maupun paripurna yang menyediakan jasa pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Selain itu tujuan dibentuknya rumah sakit menurut Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 pasal 3 menjelaskan bahwa rumah sakit adalah organisasi yang mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, meningkatkan mutu dan standar rumah sakit, dan memberikan kepastian hukum terhadap pasien. Maka dapat disimpulkan bahwa rumah sakit adalah suatu organisasi yang penting serta memerlukan adanya pengelolaan rumah sakit yang bagus untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu.

Pengelolaan rumah sakit yang baik juga perlu memperhatikan bagian penatausahaan keuangan, menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015) penatausahaan keuangan merupakan suatu kegiatan yang melakukan pencatatan secara tertib, sistematis dan kronologis atas

transaksi – transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi untuk satu tahun anggaran.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam salah satu surah dalam Al – Quran yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينِنَا إِلَىٰ آخِلٍ مِّنْهُ فَاكْتُبُوا لَهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلْيَأْتِكُمْ كَاتِبٌ بَانٌ يَكْتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ هَالِلٌ فَلْيَكْتُبْ بَلُ

Artinya: *“Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis dengan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, ...”* (QS. Al – Baqarah : 282).

Dalam surat tersebut diperkirakan terdapat 7 kata yang menyebutkan “kataba” yang jika diartikan maknanya adalah “menulis/ mencatat”. Menulis/mencatat adalah satu hal yang sangat familiar dengan proses akuntansi yang bisa bersifat materialistik. Pencatatan yang dimaksudkan dalam surat tersebut bermakna sebagai pengingat atau jika dalam konteks akuntansi adalah suatu bukti yang mana bukti tersebut digunakan dalam penyediaan informasi akuntansi. Bagian keuangan adalah sub bagian dari rumah sakit yang cukup dipentingkan di dalam pelaksanaan tata kelola rumah sakit. Dengan meningkatkan kinerja pengelolaan pada bagian keuangan, maka kinerja rumah sakit diharapkan mampu meningkat dan berkembang dengan lebih baik (Nowicki, 2007 dalam Hasitoro, 2019).

Agar operasional rumah sakit dari medis maupun non-medis dapat berjalan dengan baik yaitu efektif dan juga efisien, maka hal tersebut juga diperlukan suatu sistem guna memudahkan operasional rumah sakit dan juga meminimalisir terjadinya kesalahan dalam operasional rumah sakit itu sendiri. Dalam hal ini penatausahaan keuangan salah satunya pada bagian pengeluaran kas adalah salah satu bagian dari rumah sakit yang membutuhkan suatu sistem yang baik dan bermutu guna meminimalisir adanya risiko. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah & Rahayu (2019), yang mana penelitian ini meneliti penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada suatu rumah sakit, hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas telah sesuai dengan apa yang diharapkan, hal tersebut dapat dilihat dari laporan penggajian yang dihasilkan dari pengolahan data telah menggunakan sistem komputerasi, sehingga memberikan kemudahan dalam melaksanakan proses sistem akuntansi seperti input data dan perhitungan gaji, hal itu telah diperhitungkan dengan akurat sehingga informasi yang diperlukan oleh pihak yang berwenang dapat terpenuhi dengan cepat.

Terdapatnya suatu sistem dalam penatausahaan keuangan terkhususnya pada bagian sistem akuntansi pengeluaran kas, maka hal tersebut juga menceritakan bahwa perlu adanya suatu pengendalian internal yang mana hal tersebut akan menjadi faktor penting sehingga sistem yang digunakan dapat beroperasi dengan efektif (Fathah, 2019). Hal ini mengartikan bahwa sistem dalam pengeluaran kas juga memerlukan suatu pengendalian internal

karena kas merupakan salah satu aset dalam perusahaan atau organisasi yang bersifat likuid, artinya adalah kas merupakan aset yang mudah untuk berpindah tangan dan relatif mengalami risiko dalam hal penyelewengan, dalam mengurangi risiko tersebut maka suatu perusahaan atau organisasi perlu adanya suatu badan yang mampu mengawasi serta mampu dalam mengatur kas perusahaan, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan terarah dan terkontrol dengan baik, dengan begitu memperkecil risiko terjadinya penyalahgunaan dalam kas, dalam hal itu pengendalian internal kas akan sangat dibutuhkan (Juliati & Jannah, 2020).

Adapun dari pernyataan – pernyataan yang telah dirincikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa SPI pada penatausahaan keuangan seperti salah satunya pada pengeluaran kas rumah sakit penting diperhatikan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas rumah sakit seperti pelayanan namun juga untuk mengefisienkan serta mengefektifkan operasi dalam hal ini salah satunya yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas serta meminimalisir adanya risiko yang berkaitan dengan kas. Namun, terdapat beberapa rumah sakit yang memiliki permasalahan terkait pengendalian internal yang mana permasalahan tersebut dapat berpengaruh pada penatausahaan keuangan rumah sakit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fathah pada tahun 2019, yang mana pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat permasalahan pengendalian internal seperti ketidakjelasan struktur organisasi dan pembagian *job description* antara divisi bagian, selain itu permasalahan yang ditemukan lainnya adalah belum adanya pemisahan tugas antara bagian kasir

dengan bagian keuangan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat rumah sakit yang lemah akan pengendalian internalnya sehingga dapat memungkinkan terjadinya ketidak maksimalnya kinerja operasi pada bagian penatausahaan keuangan pada rumah sakit. Dari penjelasan yang telah dirincikan, maka juga dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya penerapan sistem pengendalian internal di suatu organisasi, maka semakin baik pula sistem akuntansi di suatu organisasi.

RS PKU Muhammadiyah Gombong merupakan rumah sakit tipe B yang terletak di kawasan kabupaten Kebumen. Sistem pengendalian intern dan Sistem Informasi Akuntansi pada penatausahaan keuangan pada RS PKU Muhammadiyah Gombong yaitu dengan melakukan prosedur – prosedur yang berkaitan dengan pengendalian intern yang mana hal tersebut diterapkan pada penatausahaan keuangan dalam bentuk fungsi organisasi, otorisasi, prosedur pencatatan, serta praktik yang sehat.

Menurut saudara Riza selaku Manajer Keuangan pengendalian intern yang diterapkan di Divisi Keuangan telah berjalan, tetapi yang terjadi di lokasi masih timbul adanya beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan di RS PKU Muhammadiyah Gombong, menurut Bapak Syahlan selaku Kepala Seksi Akuntansi permasalahan yang terjadi yaitu seperti prosedur pengeluaran kas tidak dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengeluaran kas di RS PKU Muhammadiyah Gombong akan selalu disertai dengan Surat Perintah Mengeluarkan Uang, yang mana hal tersebut juga terdapat tanda tangan sebagai tanda otorisasi dari

pihak yang bertanggung jawab, namun meski begitu sistem pengeluaran kas di RS PKU Muhammadiyah Gombong masih terdapat beberapa jenis transaksi pengeluaran yang dikeluarkan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang bertanggung jawab atau Surat Perintah Mengeluarkan Uang (SPMU) tersebut. Masalah ini terjadi ketika suatu transaksi salah satunya pada penggajian karyawan yang akan diproses melalui unit bagian keuangan untuk dicairkan ke setiap karyawan, tidak disertai dengan adanya otorisasi berupa SPMU dari unit bagian akuntansi, yang mana hal tersebut mengartikan ada beberapa transaksi salah satunya pada penggajian karyawan di RS PKU Muhammadiyah Gombong dilakukan hanya dengan diketahui oleh beberapa pihak saja seperti unit bagian pembuat daftar gaji yaitu Sumber Daya Insani (SDI) dan unit bagian pelaksana transaksi yaitu unit bagian keuangan, yang mana hal tersebut berisiko terjadinya adanya *fraud* (kecurangan) karena tidak adanya SPMU yang menjadi suatu bentuk otorisasi atau persetujuan oleh pihak yang berwenang untuk menjamin kesesuaian dengan tujuan perusahaan atau organisasi. dari bukti kas keluar tersebut maka catatan akuntansi dapat dimutakhirkan (*updated*). Dari pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa tidak adanya otorisasi akan berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi dalam hal ini transaksi pengeluaran kas sehingga hal tersebut akan menimbulkan risiko kesalahan pencatatan sehingga laporan keuangan yang disajikan kurang andal.

Permasalahan tersebut menggambarkan ketidakjelasan pengeluaran kas, menurut Horngren (1996), pengeluaran yang besar harus disetujui oleh

pihak yang berwenang untuk menjamin adanya kesesuaian dengan tujuan perusahaan. hal tersebut juga diperkuat oleh Mulyadi (2016) yang mana menjelaskan bahwa transaksi pengeluaran kas diotorisasi oleh pejabat yang berwenang dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar, dari bukti kas keluar tersebut maka catatan akuntansi dapat dimutakhirkan (*updated*). Dari pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa tidak adanya otorisasi akan berpengaruh terhadap pencatatan akuntansi dalam hal ini transaksi pengeluaran kas sehingga hal tersebut akan menimbulkan risiko kesalahan pencatatan sehingga laporan keuangan yang disajikan kurang andal.

Dari permasalahan yang telah ditemukan Pada RS PKU Muhammadiyah Gombong maka Rumah Sakit memerlukan pengendalian intern, karena dalam menjaga keutuhan aset rumah sakit secara tepat dalam penatausahaan keuangan diperlukan adanya pengendalian intern yang baik dan kuat. Adanya sistem akuntansi yang baik pada penatausahaan keuangan akan dapat mengoptimalkan alur dari sistem akuntansi pengeluaran kas, hal tersebut penting bagi rumah sakit terutama pada bagian keuangan karena mengingat kas adalah aset yang sangat mudah berubah, yang mana mengartikan bahwa kas adalah aset yang harus siap sedia saat adanya kebutuhan yang muncul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirincikan di atas maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah Sejauh Mana kualitas pengendalian internal pada sistem akuntansi penggajian RS PKU

Muhammadiyah Gombong, dan seperti apa alternatif solusi yang bisa dilakukan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk meneliti sejauh mana kualitas pengendalian internal pada sistem akuntansi penggajian RS PKU Muhammadiyah Gombong, dan seperti apa alternatif solusi yang bisa dilakukan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi Rumah Sakit, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta sebagai informasi tambahan mengenai sejauh mana kualitas pengendalian internal dan seperti apa alternatif solusi yang dapat dilakukan pada sistem akuntansi terkhususnya pada bagian pengeluaran kas, sehingga dapat dipertimbangkan dalam hal pengelolaan keuangan organisasi dan juga dalam hal pengambilan keputusan rumah sakit.
- b. Adapun manfaat bagi perguruan tinggi adalah dapat digunakan sebagai bahan atau khasanah bacaan bagi mahasiswa, menambah referensi, dan digunakan untuk menambah bacaan pada perpustakaan.

2. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dengan dilakukannya penelitian ini adalah diharapkan dapat memperkaya serta mengembangkan konsep atau teori dalam ilmu sistem akuntansi pada entitas kesehatan, khususnya berkaitan dengan bagaimana sistem pengendalian internal pada sistem akuntansi pengeluaran kas.